

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA TARFFICKING
MENGENAI PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

LELLY HERLIANTI

NIM. 10300112001

ALAUDDIN
MAKASSAR

**HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lelly Herlianti
NIM : 10300112001
Tempat/Tgl. Lahir : Bontominasa/17 Juni 1994
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jln. Mustafa Dg. Bunga Kel. Samata, Kab. Gowa.
Judul : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking
Mengenai Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum
Nasional dan Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Gowa, 4 Januari 2016

Penyusun,

LELLY HERLIANTI

NIM: 10300112001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudari Lelly Herlianti, Nim: 10300112001 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam," memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Samata-Gowa, 4 Januari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jumadi., SH.,MH

NIP.19630204 199403 1 003

Dr. Kurniati, S.Ag, M.Hi

NIP.199740627 200604 2 002

Penguji I

Penguji II

Dr. Marilang., SH.,MH

NIP.19621231 199303 1 024

Eman Sulaeman, S.H, M.H

NIP.19581225 198203 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking mengenai Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam,” yang disusun oleh saudari Lelly Herlianti, NIM: 10300112001, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2016 M, bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1437 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) dalam Ilmu Hukum Islam, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 17 Maret 2016 M.
8 Jumadil Akhir 1437H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqis I	: Dr. Marilang, SH., M.Hum	(.....)
Munaqis II	: Eman Solaiman, S.H, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Jumadi., SH., MH	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Kurniati., S.Ag., M.Hi	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 3 (tiga tahun) begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga penyusun dapat merampungkan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.

Sepantasnya persembahkan puji syukur hanya di peruntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup, yang telah mengantarkan kita semua dari dunia perhimpunan, dunia perikatan menuju ke dunia pergerakan.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini, dan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbbari, M. Ag selaku Rektor UIN Alauddin. Beserta seluruh Civitas Akademik atas bantuannya selama penyusun mengikuti pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin.
3. Bapak Dr. Jumadi.,SH.,MH dan Ibunda Dr. Kurniati.,S.Ag.,M.Hi., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Marilang, SH.,M.Hum dan Bapak Dr. Eman Solaiman, SH.,MH selaku penguji sekaligus pembimbing bagi penyusun yang telah banyak membantu dan memberikan kritik dan sarannya dalam perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Nila Sastrawaty, M.Si selaku ketua jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta Ibu Dr. Kurniati.,S.Ag.,M.Hi, selaku sekretaris jurusan yang telah banyak meluangkan waktunya untuk meberi saran dan masukan kepada penyusun.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta bimbingannya dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam mencari secercah cahaya Ilahi dalam sebuah pengetahuan di bangku kuliah.
7. K' Canci, selaku staf jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang senantiasa sabar dalam membantu penyusun dalam hal andministrasi.

8. Kedua orang tua terkasih dan tersayang, Alm. Ayahanda Abd. Azis dan Ibunda Ramlah, semoga Allah Swt melimpahkan Ridho-Nya dan Kasih-Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia mendidik penulis semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan mereka, penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya kehidupan .
9. Saudara-saudaraku yang tercinta: Rosfiati, S.Pdi, Azdar Azis, Rosmianti, S.Pd, dan Ayu Andriani, S.Pd serta kk Nua selaku kk ipar yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril serta semangat dan doanya,
10. Kepada ke empat keponakanku Muh. Reza alfarisa, Dwi ariesta, A. Indah Rezki Cantika, dan Aprilia Assahra, yang selalu menghibur penyusun dikala lelah dalam perkuliahan.
11. Ucapan terima kasih juga kepada Sahabat sekaligus guruku Sukirno, S.Hi dan M. Fadlan L Nasurung yang dari awal pengenalan hingga saat ini masi dengan sabar memberi dorongan dan motifasi kepada penyusun untuk senantiasa membaca dan belajar, dan setulus hati membagi ilmuya kepada penyusun.
12. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuanganku di HPK A 2012, Anisa, Rahmiawati Nur, Ertina Syahrani S., Radiati Kadir, Husnah, Ummul Khairi Masdar, Hardian Vina kalla, Putriyanti, Fitriani, Imma Multazam, Wahyuningsih eka sakti, Rezky Purnama Sari, Nur Fauziah Syahrir, Andi Khaerun Khidayah, Irfan Agustiaawal, M. Alif Taufiq, M. Haris, ahmad Rusyaid ahyar, Andriano Misba, Aswan, Nawir Ali, Muhdar, Nuzul Qadri, Rezki Irawan, Syahrul Ichsan Syahnur, M. Yunus Saputra yang telah banyak

memberikan inspirasi dan masukan kepada penulis, kenangan bersama kalian akan selalu terkenang.

13. Seluruh sahabat-sahabatwati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) baik yang namanya masuk secara struktur maupun kultur dan Sahabati KOPRI PC. Gowa, Sahabatku di Laspalas serta kepada teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu mereka semua telah menjadi inspiratif kepada penulis secara tidak langsung.

Akhirnya, meskipun skripsi ini telah disusun usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan metodologinya, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi. Demikian semoga apa yang disusun dalam skripsi ini diterima oleh Allah swt. sebagai amal saleh.,,Amien

Gowa, 4 Januari 2015

Penyusun,

ALAUDDIN
MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
LELLY HERLIANTI
 NIM: 10300112001

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis.....	17
1. Pengertian Kriminologis	17
2. Unsur-unsur Kriminologis	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Trafficking (Perdagangan Manusia).....	23
1. Pengertian Trafficking	23
2. Unsur-unsur Trafficking	29

BAB III ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA TRAFFICKING MENGENAI PERDAGANGAN BAYI.....	33
A. Motif dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Bayi di Indonesia	33
B. Tindak Pidana Traficcking Mengenai Perdagangan Bayi dalam Perspektif Hukum Islam	48
 BAB IV UPAYA PENCEGAHAN (PREVERENTIF) DAN PENINDAKAN (REPRESIF) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK	57
A. Upaya Pencegahan (Preverentif) Perdagangan Anak.....	57
B. Upaya Penindakan (Represif) Perdagangan Anak.....	73
 BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Implikasi Penelitian.....	76
 DAFTAR PUSTAKA	78
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	x	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dani
اوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	Fathah dan alif atau yaa'	A	A dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	I	I dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	U	U dan garis di atas

Contoh:

تام : *maata*

رَمَ : *ramaa*

لَيْق : *qiila*

تَوْمِي : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَاضٍ وَرَلْ أَفْطَال : *raudah al- atfal*

أَفْطَالُ مَدِينَةٍ دَمْلُ أَفْطَال : *al- madinah al- fadilah*

أَفْطَالُ حِكْمَةٍ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

أَنْبَر : *rabbanaa*

أَنْبَر : *najjainaa*

قَحْلَا : *al- haqq*

مَّغْن : *nu"ima*

وُدْع : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ي) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

أَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

أَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

أَسْمُشَل : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

أَزْزَلَال : *al-zalزال* (*az-zalزال*)

أَفْسَلَفَال : *al-falsafah*

أَدَالْبَال : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

أَنْوْرْمَات : *ta'muruuna*

أَنْوْنَال : *al-nau'*

أَيْش : *syai'un*

تُورْمُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
 9. *Lafz al-Jalaalah* (قُلْ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaqfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :
 قُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ *diinullah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هٰمُ فِى رَحْمَتِىْ لَآ *hum fi rahmatillaah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul
Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan
Syahrul ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an
 Nazir al-Din al-Tusi
 Abu Nasr al- Farabi
 Al-Gazali
 Al-Munqiz min al-Dalal
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

<p>Abu Al-Wafid Mummam Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)</p> <p>Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)</p>
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt = *subhanallahu wata'ala*

saw	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut :

ص	= ةحفص
م	= نالك في د ب
م ع ل ص	= م ل س ه ي ل ع ل ل ل ل ص
ط	= ة ع ب ط
ن	= رش الل و د ب
خ ل ا	= ا ه ر خ ل ل ا / ا ه ر خ ل ل ا
ج	= ع ز ج

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Lelly Herlianti
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
NIM : 10300112001
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking mengenai Perdagangan Anak dalm Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Skripsi ini membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap perdagangan anak, dengan sub permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah tinjauan kriminologi terhadap perdagangan anak ?, dan 2) Bagaimanakah perspektif hukum pidana Islam mengenai perdagangan anak ?.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Data yang dikumpulkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya ataupun tidak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum pidana trafficking mengenai perdagangan bayi yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan perdagangan orang (perdagangan anak) diatur pada pasal 83 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

Menurut tinjauan hukum pidana Islam, ketentuan sanksi hukum menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat dikatakan sesuai dan selaras dengan *maqasid al-tasyri'*, yaitu mencegah bahaya dan dampak kerugian yang lebih besar bagi kehidupan anak. Kemudian yang berwenang untuk memformulasikan ketentuan hukum tersebut adalah *Ulil al-Amri*.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi para aparat hukum agar menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terkhusus pelaku perdagangan bayi agar kejahatan ini dapat ditekan, dan memberikan bantuan hukum dan bantuan khusus terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban *trafficking* dari awal kejadian hingga proses persidangan. 2) Pemerintah diharapkan melalui Menteri Ketenagakerjaan dapat membuka lapangan kerja yang baru agar masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (khususnya anak) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Al-Qur'an sebagai kitab suci ummat Islam telah memperingatkan kepada umat Islam bahwa manusia adalah makhluk Allah swt yang dimuliakan dan paling sempurna dari segala ciptaannya yang tidak pantas untuk diperjualbelikan apapun alasannya. Hal ini diuraikan dalam QS al-Isra/17: 70 Allah swt. berfirman:

الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَرَزَقْنَهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَهُمْ ءَادَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ
تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَهُمْ

Terjemahnya :

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah Swt memuliakan Bani Adam yaitu manusia dari makhluk-makhluk yang lain, baik malaikat, jin, semua jenis hewan dan

tumbuh-tumbuhan. Kelebihan manusia dari makhluk-makhluk yang lain berupa fisik maupun non fisik. Dalam Islam sendiri telah menetapkan hak asasi anak jauh ketika anak masih dalam kandungan ibunya, anak sudah memiliki hak wujud (keberadaan). Setiap orang dilahirkan memiliki sifat merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, tidak terkecuali seorang anak di mana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dalam Islam tindakan perdagangan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki anak, yakni hak untuk hidup merdeka dan bebas dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi. Dengan melakukan tindakan perdagangan anak secara langsung berarti telah menjadikan dan menganggap anak tersebut sebagai budak yang dapat diambil manfaatnya secara ekonomi yakni dengan cara diperdagangkan atau dijual. Padahal Islam telah menghapus segala jenis praktek perbudakan dan mengakui serta melindungi adanya kemerdekaan dan kebebasan setiap individu yang merupakan hak asasi manusia yang sudah dibawa sejak manusia itu dilahirkan. Dengan demikian perdagangan anak merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam.

Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain dituangkan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4: 4,

فَكُلُّوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَن لِّكْمٍ طَيِّبٍ فَإِنَّ نَحْلَةً صَدُقْتِهِنَّ النِّسَاءَ وَءَاتُوا
 مَرِيئًا هَنِئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba dan Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun dalam KUHP tidak dirumuskan pengertian yang tegas secara hukum. Pasal 297 KUHP menjelaskan bahwa memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Maksud disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 diatur dalam pasal 83 tentang perdagangan anak menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun dalam Pasal 76F menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak.

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perdagangan orang (*Trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain; penculikan, pemalsuan, penipuan, atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk

dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Tindak pidana perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Perdagangan anak bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Banyak ahli mengatakan, perdagangan anak merupakan masalah yang gampang-gampang susah. Salah satunya penanggulangan perdagangan anak itu harus dilakukan dengan cara pendekatan *komprehensif*, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Cara penanggulangan ini juga diakui bahwa penanggulangan perdagangan anak harus dihentikan dengan pendekatan yang tepat melalui pemberian informasi akan bahaya perdagangan anak kepada masyarakat dan aparat-aparat desa.

Biasanya para sindikat penjual bayi ini menjerat korbannya dengan iming-iming membantu memberi pinjaman untuk membayar semua biaya persalinan, kemudian pada akhirnya ketika orang tua bayi tidak mampu melunasi hutangnya, maka sebagai gantinya orang tua bayi tersebut terpaksa harus merelakan bayinya. Maka tidak aneh, selama kemiskinan belum dituntaskan oleh pemerintah, selama

masyarakat belum memperoleh kesejahteraan, praktik penjualan bayi bisa dipastikan tidak akan tuntas, justru akan semakin bertambah dari tahun ke tahunnya.

Dalam mewujudkan upaya memerangi para sindikat penjualan bayi sekaligus menghentikan praktik penjualan bayi di atas, pemerintah harus melibatkan banyak pihak, yaitu para penegak hukum, masyarakat sipil, media, serta negara transit dan negara tujuan migran. Selain upaya tersebut, upaya pemerintah yang tak kalah penting adalah kepedulian pemerintah terhadap penuntasan kemiskinan. Seperti yang telah disebutkan di atas, kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab maraknya praktik penjualan bayi. Oleh sebab itu, maka sudah selayaknya pemerintah segera bertindak untuk menuntaskan masalah kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih terdapat kekurangan pengetahuan mengenai tindak pidana trafficking, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan Kriminologi Perdagangan Anak?”

Berdasarkan dari pokok masalah tersebut maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap perdagangan anak ?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam mengenai perdagangan anak ?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap pengertian sebenarnya, maka akan dijelaskan beberapa kata dalam judul skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. **Tinjauan**, adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari.
2. **Kriminologis**, adalah pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana
3. **Tindak Pidana**, sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusannya yaitu, diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang, dan seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. **Perdagangan Anak**, merupakan proses perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh anak itu.

Berdasarkan dari beberapa pengertian judul yang telah di bahas maka penulis menyimpulkan bahwa tinjauan kriminologi terhadap perdagangan anak, yaitu untuk mencoba mencari latar belakang orang berbuat kejahatan terhadap perdagangan anak

dalam berupa bentuk perbuatan pemindahan, perekrutan, pengiriman anak-anak di bawah umur dengan maksud untuk di eksploitasi sedangkan, dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah swt kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Tinjauan Kriminologi terhadap Perdagangan Anak. Banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

Maidin Gultom, dalam bukunya Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, buku ini menjelaskan tentang perdagangan orang yang kerap kali menjadi obyek perdagangannya adalah anak dan perempuan. Perdagangan orang tidak sepatasnya diterapkan pada manusia karena hakikatnya manusia bukan barang yang patut diperjualbelikan. Berdasarkan isi buku ini dapat dianalisa bahwa perempuan dan anak wajib dilindungi dari berbagai kejahatan terutama kejahatan trafficking. Jangan sampai perempuan dan anak diperkerjakan sebagai budak atau

pekerja seksual yang biasa mengakibatkan korban mengalami depresi dan ketraumaan yang mendalam.

Irma Setyowati Soemitro, dalam bukunya “Aspek Perlindungan Anak” menjelaskan bahwa perlindungan anak dikelompokkan dalam dua pengertian : 1) Perlindungan Anak bersifat yuridis, yang meliputi : a) Bidang hukum publik; b) Bidang hukum keperdataan. 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis, yang meliputi: a) Bidang sosial; b) Bidang kesehatan, c) Bidang pendidikan. Berdasarkan isi buku ini dapat dianalisa bahwa sebagai anak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dari segala kemungkinan perbuatan yang akan menimpa kepada anak tersebut.

Shanty Dellyana, dalam bukunya “Wanita dan Anak di Mata Hukum” menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan juga sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berdasarkan analisa dari buku tersebut bahwa wanita dan anak berhak mendapatkan perlindungan dari Negara agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan wanita dan anak yang akan meneruskan dan melanjutkan generasi bangsa dan negara.

Farhana dalam bukunya “Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia”. Buku ini menjelaskan tentang perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan era modern ini yang merupakan dampak krisis

multidimensional yang dialami Indonesia. berdasarkan analisa dari buku tersebut bahwa ada beberapa persoalan yang tidak terespos baik di media maupun pemerintah, yang mengakibatkan persoalan perdagangan manusia sampai saat ini belum dapat diatasi secara maksimal.

Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan, baik secara kelompok maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi ini. Meskipun ada di antaranya yang mengkaji tentang tindak pidana perdagangan orang, namun masih bersifat umum, maka dengan alasan tersebut maka dikaji secara mendalam tentang tindak pidana perdagangan anak dalam perspektif kriminologis.

E. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian doktrimal, yaitu penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis

sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena ia hanya membutuhkan data yang bersifat sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, digunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i), pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk lebih memahami mengenai tindak pidana perdagangan bayi dalam pandangan hukum pidana Islam,
- b. Pendekatan Kriminologis Formal, Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa mengenai analisa tinjauan kriminologis tentang persoalan tindak pidana perdagangan anak.
- c. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimaksudkan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum nasional mengenai tindak pidana perdagangan anak.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya ataupun tidak. Adapun pembagiannya yaitu, sebagai berikut :

a. Jenis Data

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis data kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan data tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran (kuantifikasi).

b. Sumber Data

Penyusunan skripsi menggunakan sumber data kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran yang bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya maupun tidak.

Dalam penyusunan skripsi menggunakan sumber data, yaitu sebagai berikut :

Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Dan untuk menguatkan data sekunder maka dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Undang-Undang, yaitu : norma atau kaedah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 21 tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan

Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder.
- 2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan dengan menganalisisnya. Analisis data yang dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan anak,
- b. Untuk memahami pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana perdagangan anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman tentang pengembangan teori-teori kriminologi kepada seluruh warga masyarakat dan terutama mahasiswa yang bergelut di dunia hukum.

b. Secara Praktis

Secara praktis pembahasan terhadap tindak pidana perdagangan anak ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi pembaca, masyarakat dan lembaga negara, khususnya bagi instansi pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan pengetahuan kepada pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjaun Umum Tentang Kriminologi*

1. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya “kejahatan”, dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Pihak yang pertama kali menggunakan istilah kriminologi adalah Paul Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis pada 1879. Istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah antropologi criminal. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan ternyata dipahami oleh para sarjana dengan beragam pengertian, seperti Bonger mengemukakan definisinya tentang Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari patologi social seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan dengan pula etimologi criminal.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam

bidang kriminologi adalah proses-proses dari perbuatan Undang-Undang, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain Sutherland membatasi obyek studi kriminologi pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana.

Dari berbagai definisi kriminologi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan kejahatan yang dimaksudkan dalam pengertian kriminologi dapat ditinjau dari berbagai segi, sehingga pembahasannya memerlukan ilmu-ilmu lain.

Ilmu-ilmu bantu kriminologi dalam mengkaji kejahatan dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Ilmu hukum, berperan membantu kriminologi dalam hal untuk menentukan kriteria suatu perbuatan secara yuridis dianggap sebagai perbuatan jahat (kejahatan). Demikian juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong sebagai tindak kejahatan, ataupun penetapan sesuatu perbuatan sebagai kejahatan sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Sosiologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan kejahatan sebagai gejala sosial, kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang dalam masyarakat.
- c. Psikologi membantu kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya.

- d. Ekonomi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan (rendahnya penghasilan seseorang).
- e. Antropologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan tanda-tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- f. Ilmu jiwa membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena gangguan kejiwaan.

2. Unsur-unsur Kriminologis

Setelah mengetahui arti dan tujuan kriminologi tentunya akan menjadi jelas apa yang unsur kriminologi. Untuk itu unsur kriminologi menjadi perlu untuk diungkapkan, yaitu:

a. Kejahatan

Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan ini negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukum atau tindakan). Namun dalam perkembangan kriminologi setelah 1990-an khususnya studi sosiologi terhadap perundang-undangan pidana telah menyadarkan bahwa dijadikannya suatu perbuatan tertentu sebagai suatu perbuatan

pidana (kejahatan) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (termasuk kepentingan politik).

Thorsten Sellin mengutarakan bahwa pemberian batasan pengertian kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan, karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara dan merupakan ciptaan kelompok-kelompok normative manapun, serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

b. Penjahat

Penjahat yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, dan perbedaan tersebut ada pada aspek biologi, psikologis maupun sosio-kultur. Oleh karena itu dalam mencari sebab-

sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada cirri-ciri biologisnya dan aspek kultural.

Keberatan terhadap kriminologi positif yaitu bahwa bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diperlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks.

c. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Penjahat (Pelaku)

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi Undang-Undang belum mengaturnya. Studi mengenai reaksi masyarakat ini menghasilkan kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi.

- 1) Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kejahatan).
- 2) Dekriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan pidana (kejahatan) tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan) atau dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidanya suatu perbuatan.

- 3) Depenalisasi adalah dihilangkannya ancaman pidana pada suatu perbuatan yang dilarang dan diganti dengan ancaman yang lain misalnya ganti kerugian atau sanksi administrasi.

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap penjahat (pelaku) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan, dengan perkembangan kriminologi setelah 1990-an sebagai pengaruh berkembangnya perspektif labeling dan kriminologi kritis, mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat ini terutama diarahkan untuk mempelajari proses bekerjanya hukum dan perumusan hukum, khususnya bekerjanya aparat penegak hukum.

Aliran kriminologi baru, memandang perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidak merata kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Ukuran menyimpang tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Trafficking (Perdagangan Manusia)

1. Pengertian Trafficking

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Anak dan perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (*trafficking in persons*), menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang tindak pidana perdagangan orang, maka dalam perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan anak di bawah umur. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang

mendapat perlindungan hukum dalam pasal tersebut. Adapun laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum.

Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan utang. Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penangkapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penangkapan. Jadi, akan sulit untuk menghukum mereka yang melakukan penangkapan karena KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan di lapangan dan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan.

Pasal 297 tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa. Hampir sama dengan penjelasan pasal 297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.

Dengan penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan dan eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan pasal tersebut merupakan penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari Negara yang merupakan penjelasan dari KUHP. Adapun perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dalam pasal 297 juga menimbulkan banyak penafsiran mengenai pengertian di bawah umur, apakah hanya dikenakan kepada wanita dan anak laki-laki yang dibawah umur, atau wanitanya adalah wanita dewasa dan anak laki-laki di bawah umur, yang akibatnya anak perempuan dan anak laki-laki dewasa tidak terlindungi. Adapun asas hukum pidana menentukan bahwa hukum pidana menganut sistem interpretasi negatif, yaitu tidak boleh ada interpretasi lain selain yang ada dalam KUHP itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) berbunyi,

Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang

tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang timbul.

Adapun dalam protokol PBB, yang dimaksud dengan perdagangan perempuan dan anak adalah:

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual,

- kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi.
 - c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak atau untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.
 - d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya tetapi tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankan tidak sesuai ketentuan peraturan. Sedangkan pemalsuan dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan setiap yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Dengan demikian, perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia. Terjadinya perdagangan orang ini akibat faktor kemiskinan, tidak tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari

pertanian ke industri serta krisis ekonomi, maka perlu usaha penanggulangan perdagangan orang dan pembaruan hukum.

2. Unsur-unsur Trafficking

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak selalu mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dengan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Adapun yang menjadi unsur-unsur dari trafficking tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Jika salah satu unsur di atas terpenuhi maka terjadilah perbuatan perdagangan orang. Persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan orang tersebut kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti, bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan telah digunakan.

Setiap tindakan rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi, dianggap sebagai perdagangan orang walaupun cara-cara pemaksaan atau penipuan tidak digunakan. Hal ini ditegaskan bahwa untuk korban perdagangan anak, tanpa terpenuhinya unsur kedua, yaitu menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan bentuk perdagangan orang.

Cara tipu daya, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan menunjukkan bahwa perdagangan orang dapat terjadi tanpa adanya kekerasan secara fisik. Adapun penyalahgunaan akan kedudukan rentan (*abuse of position of vulnerability*) diartikan sebagai sebuah situasi di mana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima, kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Cara-cara tersebut dapat dilakukan mengakibatkan terdistornya kehendak bebas seseorang. Tipu daya dan penipuan berkenaan dengan apa yang dijanjikan dan realisasinya, yaitu mencakup jenis pekerjaan dan kondisi kerjanya.

Selain unsur perbuatan dan cara dari perdagangan orang, ada juga unsur tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, yaitu untuk eksploitasi dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Eksploitasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan dan pemaksaan dan kerja paksa, sedangkan eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dijual atau karena korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual. Adapun eksploitasi lainnya berupa kerja paksa, perbudakan, penghambatan, atau penjualan organ tubuh.

Namun unsur tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi ini tidak relevan lagi atau tidak berarti apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan telah digunakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ditegaskan dalam pasal 1 angka 7, menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan dari korban, ditegaskannya persetujuan korban sebagai hal yang tidak relevan atau tidak berarti. Namun dipertegas dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak

pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang harus menimbulkan akibat.



BAB III

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN ANAK

A. Motif dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia

1. Motif Perdagangan Anak di Indonesia

Setiap manusia di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai suatu hubungan erat ataupun memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan kepentingan satu dengan yang lainnya dan juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang yang dikenal dengan sebutan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat di mana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri.

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan kejahatan itu terjadi apalagi untuk menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan.

Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang mempengaruhi manusia itu untuk melakukan kejahatan. Sesuai sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas dari perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya.

Kasus perdagangan dan penculikan anak pada dasarnya adalah dua bentuk pelanggaran hak anak yang sering kali dilakukan bersamaan dan tergolong paling kejam. Sebab, bukan saja telah merampas hak anak untuk hidup merdeka, tetapi juga menyebabkan anak untuk terpaksa harus berpisah dan kehilangan kasih sayang orang tua kandungnya serta tercabut dari akar budaya komunitas aslinya. Bahkan, yang memprihatinkan, disinyalir kasus penculikan anak bukan hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang tua atau keluarga tertentu yang menginginkan memiliki anak untuk diadopsi, tetapi juga terkadang untuk diperdagangkan organ tubuhnya secara komersial. Model penculikan anak yang terakhir ini, selain kejam sesungguhnya juga tergolong biadab.

Berdasarkan pengalaman penculikan dan perdagangan anak yang pernah terjadi di tanah air, motif pelaku melakukan penculikan anak relatif beragam. Secara garis besar, biasanya motif yang melatarbelakangi adalah sebagai berikut:

Pertama, praktik penculikan anak yang dimanfaatkan sebagai tenaga kerja paksa, baik itu disektor industri, sebagai TKI, maupun sekedar dijadikan pengemis atau anak jalanan dibawah komando seorang preman yang sangar dan jahat. Di berbagai kota besar, sering terjadi anak-anak jalanan mengalami pengekangan secara halus, yakni terpaksa hidup dibawah kekuasaan dan perlindungan seorang preman dengan kompensasi menyetorkan sebagian besar penghasilan mereka mengamen atau mengemis kepada sang patron tersebut.

Hasil pantauan dari *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) menemukan bahwa tak jarang anak-anak yang menjadi korban penculikan dipaksa bekerja disektor industry, pertanian atau konstruksi dengan bayaran yang rendah atau tidak dibayar sama sekali, sementara disaat yang sama mereka harus bekerja dalam kurun waktu yang lama lebih dari 12 jam atau bahkan lebih dari 15 jam per hari. Banyak dari anak-anak yang bekerja paksa ini, karena status mereka yang ilegal dan tidak dimilikinya dokumen yang sah karena sudah dirampas oleh pihak pengusaha atau makelar, terpaksa menerima nasib karena ketidakberdayaan mereka.

Kedua, praktik penculikan anak sebagai bagian dari modus kriminal untuk memperoleh uang besar dalam jangka waktu pendek. Kasus penculikan anak untuk meminta uang tebusan dari keluarga korban ini tercatat telah berkali-kali terjadi.

Ketiga, kasus penculikan dan perdagangan anak untuk dijadikan korban kekerasan seksual, baik untuk dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) maupun untuk kepentingan perbudakan yang dibungkus dengan kedok perkawinan. Biasanya, akibat kemiskinan, anak-anak perempuan dengan muda ditipu oleh para makelar untuk dijual kepada sejumlah lelaki di luar negeri sebagai istri yang sah, namun kehidupan sehari-hari mereka sebetulnya tak ubahnya seperti PRT gratisan plus paksaan untuk memberikan pelayanan seksual setiap waktu. Keempat, praktik penculikan anak untuk diperjual belikan di luar negeri, baik untuk dimanfaatkan organ tubuhnya maupun untuk dijadikan anak adopsi oleh keluarga tertentu yang menginginkan anak angkat.

Anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

a. Bayi sebagai korban

Perdagangan bayi merupakan salah satu isu yang marak dibicarakan dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan tujuan yang beraneka ragam mulai dari perdagangan bayi dengan tujuan adopsi, diambil organ

tubuhnya, sebagai budak dan lain sebagainya. Usia bayi pun beraneka ragam dan dilakukan dengan modus operandi yang beragam pula. Bayi-bayi tersebut diperoleh dengan cara menculik, melilit orangtuanya dengan hutang yang diperkirakan bahwa mereka tidak akan mampu membayar hutangnya, perekrutan wanita-wanita hamil yang sedang mengalami masalah mulai dari masalah ekonomi, kehamilan yang tidak dikehendaki hingga hamil di luar nikah.

Dalam hal penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang diketahui, aparat keamanan mengalami kesulitan dalam hal pengembalian bayi tersebut ke tempat asalnya mengingat sulitnya untuk melacak asal bayi tersebut dan tidak adanya pihak yang mengaku sebagai orangtua dari bayi tersebut.

b. Anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan)

Perdagangan anak menjadi kategori tersendiri karena dalam kenyataannya anak-anak baik anak perempuan dan anak laki-laki berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Anak-anak tersebut berusia 3 hingga 20 tahun dan dipekerjakan di ladang-ladang perkebunan sebagai buruh tanpa upah, pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan lain. Anak-anak ini menjadi primadona karena mereka lebih mudah diatur daripada orang dewasa dan biaya yang dikeluarkan pun relatif lebih sedikit (misalnya makanan yang tidak sebanyak konsumsi orang dewasa).

c. Perdagangan bayi

Beberapa kasus menunjukkan bahwa rekrutmen justru dilakukan oleh Bidan dengan alasan membantu ibu-ibu yang tidak memiliki biaya dan untuk menjamin bahwa bayi tersebut lahir dengan selamat daripada diabortasi dengan berbagai alasan.

Memelihara dan merawat bayi dari para ibu yang tidak sanggup merawat bayinya sendiri itu baik, tapi kalau bayi itu diserahkan kepada orang lain dengan patokan biaya tertentu, itu bisa dianggap sebagai tindakan kriminal.

Kasus-kasus perdagangan anak yang dapat diperoleh dari berbagai berita di media massa, bermodus operandi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjanjikan pada orang tuanya bahwa anaknya akan diadops,
- b. Tidak diketahui cara perekrutannya, namun menurut pengakuan pelaku, bayi tersebut diperoleh dari pembantunya yang tidak kuat memelihara,
- c. Dengan alasan daripada diaborsi lebih baik ia tampung dan disalurkan, ibu bidan tersebut menolong persalinan wanita-wanita yang tidak mampu atau tidak menghendaki bayinya,
- d. Menyelundupkan bayi dengan meletakkannya dalam kantong gabus
- e. Membantu wanita yang tak sanggup membayar persalinan,
- f. Menculik ibu dan bayinya.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak di Indonesia

Perdagangan anak adalah salah satu kejahatan tindak pidana yang harus diberantas. Kesenjangan ekonomi adalah faktor utama terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Praktek perdagangan anak adalah kejahatan yang harus diberantas secara terus-menerus, jadi tidak ada lagi anak-anak yang akan menjadi korban tindak pidana perdagangan anak.

Jenis jual beli manusia yang sulit diberantas di muka bumi ini adalah jual beli bayi dan jual beli anak perempuan untuk keperluan seksual. Bagi para sindikat penjualan anak, bisnis ini merupakan bisnis besar yang dapat menghasilkan keuntungan milyaran rupiah dalam waktu singkat. Bisnis ini pun dibungkus dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern dan terkesan sulit untuk dikenali. Bagi penyidik yang kurang profesional maka akan mengalami kesulitan dalam membongkar modus ini.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan bayi yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan di luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka.

Keinginan untuk meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dan dengan alasan untuk membantu orang tua, banyak anak-anak yang mengalami eksploitasi misalnya saja menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual koran dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua untuk mendorong anaknya pergi kejalanan. Sering kali mereka diberi target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Dan bahkan tak jarang anak bukan hanya

memberikan kontribusi bagi keluarga tapi terkadang menjadi sumber utama penghasilan.

Selain itu, ada pula orang tua yang justru menggunakan uang pemberian anaknya untuk keperluan konsumtif, seperti membayar angsuran motor, atau membayar berbagai kebutuhan hidup lainnya. Apabila target tersebut tidak terpenuhi atau anak tidak memberikan sejumlah uang yang telah ditargetkan maka orang tua tidak akan segan melakukan kekerasan terhadap anaknya.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi sehingga tidak banyak anak yang dijadikan pelacur untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya terutama untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya perdagangan anak dengan tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Rendahnya pendidikan dan buta huruf serta keterampilan yang dimiliki oleh seorang anak mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor. Hal ini menunjang terjadinya perdagangan terhadap anak terutama bayi.

Di dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pada umumnya anak menjadi korban

perdagangan karena dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah terbatas. Di samping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak.

Kurangnya pendidikan formal di bidang agama juga menjadi salah satu faktor meningkatnya perdagangan terhadap anak terutama untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan *trafficker* untuk merekrut anak-anak menjadi pelacur.

Ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak menyebabkan anak menjadi korban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh anak sehingga begitu mudah untuk terpengaruh ketika di iming-imingi uang banyak oleh *trafficker* karena kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan mengenai agama dimana hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut.

c. Faktor Penegakan Hukum

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut menjadi

pedoman bagi perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang terbesar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung deskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah

umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum

Juga interpretensi hukum yang berkembang terhadap pasal 297 KUHP menyempitkan makna tindak pidana tentang perdagangan orang. Khusus perempuan dan anak. Dengan tidak jelasnya definisi tentang perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP, maka terjadi interpretasi hukum yang sempit sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan KUHP yang disusun R. Sugandhi, yang menyatakan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur hanya sebatas pada eksploitasi pelacuran dan pelacuran paksa. Akan tetapi, interpretasi ini adalah interpretasi tidak resmi. Berarti penjelasan ini bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terkait dengan perdagangan manusia. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap segala bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasi dalam perdagangan orang seperti penyekapan.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 83 telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, Undang-Undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, Undang-Undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp. 60 juta sampai Rp. 300 juta. Undang-Undang ini sering digunakan sebagai dasar untuk menangkap pelaku perdagangan orang. Penerapan pasal-pasal tersebut bukan berarti secara otomatis menyelesaikan masalah. Sejumlah kekurangan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak jarang membuat para pelaku perdagangan manusia lolos dari hukum yang seharusnya diterima.

Kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran sekarang ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan anak untuk prostitusi atau pelacuran merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

Di samping lemahnya pemahaman tentang perdagangan anak, produk hukum yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap perdagangan anak ini untuk dilakukan. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak, sehingga tidak menyentuh segmen perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi dan pelacuran, dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum adanya ketidakmampuan aparat hukum membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak adanya keterbukaan berkenaan dengan aturan-aturan serta prosedur yang berlaku. Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan bahwa korban tidak yakin akan reaksi penegak hukum terhadap yang dialami korban. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran dan ketidakpercayaan para korban oleh penegak hukum karena lemahnya koordinasi anatarpenegak hukum.

Korupsi telah menimbulkan akibat yang luas di hampir segala aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, korupsi melibatkan hampir semua institusi di Indonesia termasuk eksekutif, legislative, dan yudikatif. Selain itu, juga terjadi di semua tingkat, baik di pusat termasuk kantor kepresidenan sampai dengan aparat pemerintah desa di tingkat paling bawah.

Akibat korupsi yang sudah menjadi bagian hidup sehari-hari maka banyaknya peraturan yang tidak bias diterapkan dan banyak institusi serta pelayanan public yang tidak bias bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya berpengaruh juga terhadap pencegahan *trafficking* dan penyelesaian kasus *trafficking*. Biaya ilegal dan pemalsuan dokumen merupakan contoh korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap perempuan dan anak-anak.

Korupsi sebagai masalah utama dalam lingkungan pegawai negeri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (hakim). Dimana berawal dari petugas polisi yang menolak memulai penyidikan atau menghentikan penyidikan setelah menerima uang, perlakuan polisi yang buruk terhadap korban, serta keterlibatan polisi dalam praktik-praktik perdagangan orang termasuk anak.

B. Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan anak dalam perspektif hukum pidana Islam, terlebih dahulu harus dipahami tentang hak kebebasan dan kemerdekaan setiap individu dalam Islam. Karena dengan melakukan perdagangan anak secara langsung telah merenggut kebebasan dan kemerdekaan anak tersebut. Islam adalah ajaran yang sangat menghormati kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia, Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan

dalam keadaan merdeka, sehingga segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap kebebasan dan kemerdekaan setiap individu sangat ditentang oleh Islam.

Hukum Islam merupakan perintah dan larangan dari Allah swt, yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim, agar kehidupan manusia menjadi aman, tertib dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Manifestasi dari tujuan ini adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah swt dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hukum pidana Islam atau *jinayah* merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku sejak Nabi Muhammad saw menjadi Rasul.

Pada zaman Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan anak dalam perspektif hukum pidana Islam, terlebih dahulu harus dipahami tentang hak kebebasan dan kemerdekaan setiap individu dalam Islam.

Karena dengan melakukan perdagangan anak secara langsung telah merenggut kebebasan dan kemerdekaan anak tersebut. Islam adalah ajaran yang sangat menghormati kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia, Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan merdeka, sehingga segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap kebebasan dan kemerdekaan setiap

individu sangat ditentang oleh Islam. Islam melindungi hak-hak setiap manusia untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan.

Jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia bertitik pangkal dari pengakuan Islam tentang martabat manusia di planet bumi ini, baik dalam pandangan Allah swt maupun dalam pandangan sesama makhluk. Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain dituangkan dalam firman Allah swt QS Al-Isra/17: 70.

مِّنْ وَرَزَقْنَهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحْمَلْنَهُمْ ءَادَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ
تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

Terjemahnya :

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt memuliakan Bani Adam yaitu manusia dari makhluk-makhluk yang lain, baik malaikat, jin, semua jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kelebihan manusia dari makhluk-makhluk yang lain berupa fisik maupun non fisik. Dalam Islam sendiri telah menetapkan hak asasi anak jauh ketika anak masih dalam kandungan ibunya, anak sudah memiliki hak wujud (keberadaan). Setiap orang dilahirkan memiliki sifat merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, tidak terkecuali seorang anak di mana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak, Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadits yaitu sebagai berikut :

مُكِّي قَلِي دُهُك دَالِ فَمُ هَبْلُونِ أَسْ حَمُّ أَلُو دَالِ أَوْ لَمْ رُكَا

Artinya:

Muliakan dan tumbuh kembangkan anak-anakmu dengan baik. Sesungguhnya anak-anakmu merupakan karunia bagimu.” (HR. Ibnu Majah).

Sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, hak tertentu telah mendapatkan jaminan berdasarkan al-Qur'an, yang di antaranya adalah hak hidup, keamanan diri, kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Di samping itu, al- Qur'an juga menekankan persamaan manusia. Karena salah satu unsur dasar sistem nilai Islam adalah prinsip keseimbangan atau persamaan.

Dengan demikian jaminan hak-hak asasi manusia dalam Islam adalah sepenuhnya berasal dari pemberian Allah swt. Oleh karena itu tak satu pun penguasa, negara atau siapapun juga yang berwenang membuat perubahan ataupun mempunyai hak untuk menghapus atau mencabutnya.

Dengan melihat uraian di atas maka dapat diketahui bahwa tindakan perdagangan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki anak, yakni hak untuk hidup merdeka dan bebas dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi. Dengan melakukan tindakan perdagangan anak secara langsung berarti telah

menjadikan dan menganggap anak tersebut sebagai budak yang dapat diambil manfaatnya secara ekonomi yakni dengan cara diperdagangkan atau dijual.

Padahal Islam telah menghapus segala jenis praktek perbudakan dan mengakui serta melindungi adanya kemerdekaan dan kebebasan setiap individu yang merupakan hak asasi manusia yang sudah dibawa sejak manusia itu dilahirkan. Dengan demikian perdagangan anak merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Kesadaran bahwa anak pada hakikatnya merupakan titipan dan amanat Allah swt maka sepantasnya harus ditanggapi dan diterima dengan penuh tanggung jawab.

Kelalaian menunaikannya merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, keengganan untuk menunaikannya merupakan sikap dan perilaku yang tidak bersahabat.

Ahl al-Halli wal Aqdi dan *Ulil al-Amri* apabila telah sepakat terhadap sesuatu urusan atas dasar kepentingan umum yang lebih besar terhadap masyarakat, maka untuk mentaati keputusan mereka adalah wajib bagi semua rakyat. Dalam hal ini ada lima kriteria dalam menentukan kepentingan umum, yaitu:

1. Memprioritaskan tujuan-tujuan syara' (syari'at)

Tujuan menetapkan syari'at berorientasi pada lima hal, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang menjamin lima hal tersebut adalah kepentingan umum. Dan segala sesuatu yang mengabaikan lima hal tersebut ada kemafsadatan (kerusakan).

2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan al-Qur'an adalah pertimbangan umum itu harus tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an yang qath'i (jelas pendalilannya). Maka ijihad mengenai materi yang sudah jelas maslahatnya dalam masalah ibadah jelas tidak diperbolehkan. Akan tetapi ijihad mengenai penerapan hukum yang menyangkut kepentingan manusia selaku subyek hukum yang kondisinya sangat kompleks sangat diperlukan. Umar bin Khattab dalam keputusannya pernah menunda pembagian zakat kepada *mu'allaf qulubuhum* padahal mereka adalah mustahiq zakat. Ijihad Umar tersebut tidak berpaling dari nash, melainkan menjaga dengan ketat apa yang terkandung dalam nash.

Umar tampak sekali berhati-hati dalam menentukan mustahiq zakat. Artinya menjadikan *mu'allaf* sebagai mustahiq zakat adalah untuk kepentingan umum.

3. Tidak bertentangan dengan as-Sunnah

Sama dengan al-Qur'an, pertimbangan kepentingan umum dalam ijihad juga tidak bertentangan dengan as-Sunnah. Maksudnya tidak bertentangan dengan materi hukumnya, sedangkan penerapan hukumnya tentu memerlukan ijihad. Umar bin Khattab berijihad tentang talak tiga. Dalam Sunnah talak tiga sekaligus dianggap satu, ketentuan ini berlaku di zaman Rasulullah sampai zaman Abu Bakar. Di zaman Umar kondisinya berubah, di mana pihak suami sering melakukan kesewenang-wenangan dalam menjatukan talak tiga, sementara pihak istri pada pihak yang mudah dipermainkan.

Pendapat Umar yang mengatakan talak tiga sekaligus dianggap jatuh tiga tersebut sebenarnya mengamalkan Sunnah, karena maksud Sunnah sebenarnya adalah

mempersulit talak dan memberikan kesempatan rujuk sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan.

4. Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas

Ijtihad dalam masalah yang baru terdapat dalam nash, metode utama yang digunakan Syafi'i adalah qiyas. Dengan pendekatan 'illat hukum. Sedangkan kepentingan qiyas adalah untuk menjamin kepentingan hukum, meskipun semua kepentingan umum tidak hanya dari qiyas.

5. Memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar (penting)

Dalam menentukan hukum maka harus diutamakan kepentingan yang lebih besar dibanding dengan kepentingan yang lain. Untuk menentukan peringkat kepentingan dapat dipertimbangkan halal sebagai berikut:

a. Memandang nilai kepentingan umum dari segi zatnya.

Pandangan ini berpedoman pada lima tujuan syara' tersebut sesuai dengan peringkatnya masing-masing.

b. Memandang kepentingan umum dari segi cakupannya.

Jika kepentingan umum tersebut itu hanya satu aspek saja, misalnya keturunan, maka ketentuan peringkatnya beralih pada seberapa jauh cakupan suatu perintah itu ada pada satu aspek. Contoh untuk memelihara keturunan terdapat kepentingan umum individu dan kolektif, yang didahulukan adalah kepentingan umum kolektif (misalnya masalah keluarga berencana).

c. Memandang kepentingan umum dari segi akibatnya.

Pertimbangan ini berkaitan dengan apakah suatu perbuatan yang semula dipandang sebagai kepentingan umum berakibat juga pada kepentingan umum yang lain. Jika suatu perbuatan yang semula dipandang kepentingan itu dilakukan, tetapi akibatnya (diduga keras) menimbulkan mafsadat (kerusakan) atau memberi peluang munculnya kemaksiatan, perbuatan yang diduga kepentingan umum itu tidak dilakukan. Misalnya, menjual anggur (bahan khamr) kepada orang yang biasa membuat khamr. Semula menjual (jual beli) anggur adalah kepentingan umum, tetapi karena menjual kepada tukang membuat (produsen) khamr, maka yang lebih merupakan kepentingan umum adalah tidak menjual buah anggur tersebut kepada produsen khamr.

Dengan melihat uraian di atas maka dapat diketahui bahwa tindakan perdagangan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki anak, yakni hak untuk hidup merdeka dan bebas dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi. Dengan melakukan tindakan perdagangan anak secara langsung berarti telah menjadikan dan menganggap anak tersebut sebagai budak yang dapat diambil manfaatnya secara ekonomi yakni dengan cara diperdagangkan atau dijual. Padahal Islam telah menghapus segala jenis praktek perbudakan dan mengakui serta melindungi adanya kemerdekaan dan kebebasan setiap individu yang merupakan hak asasi manusia yang sudah dibawa sejak manusia itu dilahirkan. Dengan demikian perdagangan anak merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN (PREVERENTIF) DAN PENINDAKAN (REPRESIF)

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

A. *Upaya Pencegahan (Preverentif) Perdagangan Anak*

Dinamika dan berbagai upaya yang dilakukan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional untuk memberantas perdagangan orang, terutama perempuan dan anak melalui instrumen internasional sejak tahun 1904. Usaha penghapusan tersebut ditandai dengan diselenggarakannya konferensi internasional perdagangan manusia pertama kali, yakni konferensi mengenai perdagangan wanita atau "trafficking in women" diadakan di Paris tahun 1895. Sembilan tahun kemudian pada tahun 1904, di kota yang sama, 16 negara kembali mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan internasional pertama menentang Perdagangan Budak Berkulit Putih yang dikenal dengan istilah *Intenational Agreement the Supresssion of White Slave Traffic*. Kesepakatan tersebut menentang dipindahkannya perempuan ke luar negeri dengan tujuan pelanggaran kesusilaan. Konvensi awal ini membatasi diri pada penentangan bentuk pemaksaan dalam perdagangan perempuan, tetapi sama sekali tidak mempermasalahkan tiadanya bukti pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam perekrutannya.

Kesepakatan tersebut dalam prakteknya tidak berjalan efektif karena gerakan anti perdagangan manusia pada saat itu lebih didorong karena adanya ancaman terhadap kemurnian populasi perempuan kulit putih. Pada sisi lain, kesepakatan tersebut juga lebih banyak memfokuskan perhatian kepada perlindungan korban daripada menghukum pelaku kejahatannya, sehingga tepat enam tahun kemudian, yakni pada tahun 1910 disetujui *Internasional Convention for the Supression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948). Konvensi tersebut kemudian mewajibkan negara untuk menghukum siapa pun, yang membujuk orang lain, baik dengan cara menyelundupkan atau dengan menggunakan kekerasan, paksaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan cara lain dalam memaksa, mengupah, menculik atau membujuk perempuan dewasa untuk tujuan pelanggaran kesusilaan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan dibantu oleh Liga Bangsa-bangsa, ditandatangani *Convention on the Supression of Traffic in Women and Children* pada tahun 1921 (Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947) dan *International Convention of the Supression of Traffic in Women of Full Age* di tahun 1933 (Konvensi Internasional tanggal 11 Oktober 1933 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947).

Keempat konvensi tersebut kemudian dikonsolidasikan oleh PBB pada tahun 1949 ke dalam *Convention for the Supression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others*. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk menghukum mereka yang menjerumuskan orang-orang, bahkan korban jika menyetujuinya, demi memuaskan manusia lainnya. Dalam konvensi ini juga disebutkan bahwa negara peserta juga terikat untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi pelacur. Konvensi ini juga mencakup mereka yang secara finansial terlibat dalam pengelolaan atau pengoperasian rumah pelacur atau siapapun yang menyewakan atau menyewa tempat-tempat untuk melacurkan orang-orang lain.³¹

Pada tahun 1926, lahirlah sebuah instrumen internasional yang secara tegas melarang praktek perbudakan. Konvensi ini kemudian ditandatangani di Jenewa pada tanggal 25 September 1926. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah guna penghapusan sesegera mungkin perangkat-perangkat kelembagaan serta praktek-praktek yang meliputi perbudakan berdasarkan hutang, perhambaan, pertunangan anak dan praktek-praktek perkawinan dimana seorang perempuan diperlakukan sebagai harta milik, baik oleh keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya, atau bisa diwariskan setelah kematian suaminya.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 mengadopsi Konvensi tentang United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau Konvensi mengenai Kejahatan Terorganisir. Negara Peserta (*States Parties*) menyatakan tindakan efektif (effective action) untuk mencegah dan memerangi perdagangan

wanita dan anak memerlukan pendekatan internasional komprehensif di negara-negara asal, transit, tujuan (*the countries of origin, transit, and destination*) termasuk upaya-upaya untuk mencegah perdagangan, menghukum pelakunya (*trafficker*), dan melindungi korbanya termasuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional.

Indonesia telah mengesahkan protokol ini pada tanggal 5 Maret 2009 dengan UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Selanjutnya, dalam Pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak sanksi yang diberikan terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia maupun organisasi non-pemerintah dalam menghadapi perdagangan perempuan dan anak. Strategi tersebut dibutuhkan atau dilakukan baik bersifat preventif maupun represif, yaitu penguatan pada kebijakan migrasi serta hukum pidana untuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban, serta diupayakan penanganan sebagai korban tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai perempuan dan anak.

Selain upaya melalui pembuatan instrumen hukum, yang mengatur secara umum maupun khusus tentang perlindungan hukum terhadap perdagangan perempuan dan anak seperti yang terakhir diantaranya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Indonesia juga membuat Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RANP3A) yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2002. RANP3A ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan perempuan dan anak.

Dalam Hukum Nasional Indonesia, sebelum lahirnya UU 21 Tahun 2007 dan UU Nomor 14 Tahun 2009, upaya-upaya perlindungan hukum untuk mencegah dan menangani kejahatan perdagangan perempuan dan anak didasarkan pada ketentuan KUHP. Peraturan yang lain adalah UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta beberapa Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia antara lain : Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO Nomor 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak dan lain-lainnya.

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, termasuk bayi. Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh pasal 297 KUHP. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk adopsi ilegal anak dan bayi.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan pasal 297 KUHP adalah tentang batas usia belum dewasa (di bawah umur) bagi anak laki-laki yang diperdagangkan. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula pasal-pasal

yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun sehingga tidak ada patokan yang jelas untuk masalah umur ini. Sementara itu, menurut Burgerligh Wetbook (BW), usia belum dewasa adalah di bawah 21 tahun atau belum menikah, sementara menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa anak adalah ‘orang yang mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin’.

Disini dapat ditafsirkan bahwa seseorang di bawah umur 18 tahun yang sudah kawin berarti tidak masuk kategori ‘anak’ lagi. Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Mengenai batasan usia ini harus ada satu ketentuan yang tegas agar hanya ada satu pengertian.

Sebagai upaya untuk menutupi kelemahan dalam KUHP, pemerintah telah membuat Rancangan KUHP dengan mengakomodir pasal-pasal yang terkait dengan perdagangan orang secara eksplisit, yaitu :

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan.
3. Mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan
4. Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit.
5. Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi.

6. Persetujuan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan.
7. Pemasukan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang. Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang.
8. Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang.
9. Perdagangan orang di kapal.

Namun demikian, apabila dicermati mengenai hal-hal di dalam Rancangan KUHP tersebut :

1. Pasal-pasal tersebut lebih bersifat preventif.
2. Pengaturan tentang korban perempuan dan anak lebih bersifat general, sehingga dianggap belum sesuai dengan kebutuhan yang memerlukan aturan yang lebih spesifik. Tidak adanya hukum yang khusus yang mengatur tentang masalah perdagangan perempuan dan anak, mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus perdagangan dan lemahnya penegakan hukumnya. Aturan yang diberlakukan sementara ini adalah berdasarkan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002, maupun UU Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dipergunakan untuk menjaring *trafficker* sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan 88 yang berbunyi :

Pasal 83:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tetapi dalam undang-undang ini, cakupannya hanya terbatas pada anak sehingga pelaku perdagangan orang dengan korban yang bukan anak-anak, tidak dapat dikenakan Undang-undang ini.

Di dalam ketiga UU tersebut, tidak adanya definisi resmi tentang perdagangan orang baik dalam KUHP, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka di dalam praktek pasal-pasal tersebut sulit untuk digunakan. Pihak Kepolisian juga melaporkan, bahwa pelaku perdagangan orang sering kali terdiri dari orang-orang yang berbeda pada setiap tahapan perdagangan orang seperti misalnya orang yang merekrut berbeda dengan orang yang mengantar atau membawa korban, dan lain lagi orang yang menampung atau menyerahkan korban kepada pengguna. Sehingga jika ia tertangkap oleh pihak berwajib, paling hanya bisa dikenakan tuduhan penipuan atau perlakuan tidak menyenangkan yang ancaman hukumannya ringan tidak sepadan dengan penderitaan.

Di dalam konvensi ILO 182 dinyatakan bahwa penjualan dan perdagangan anak adalah "Suatu bentuk perbudakan atau praktek serupa perbudakan yang pada hakekatnya sama saja dengan perbudakan itu sendiri ". Karena itu penjualan dan

perdagangan anak termasuk salah satu bentuk terburuk Perburuan Anak. Konvensi ILO No. 182 ini menekankan pentingnya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk Perburuan Anak. Oleh karena itu negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini berkewajiban untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya melalui program-program aksi yang ditujukan untuk memberantas dan mencegah bentuk-bentuk terburuk Perburuan Anak.

Dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan pendidikan, penyebarluasan informasi, dan peningkatan pengawasan. Peningkatan pendidikan dan penyebarluasan informasi merupakan faktor yang sangat penting. sebagaimana dilaporkan Rosenberg, profil perempuan dan anak korban perdagangan orang serta mereka yang beresiko, pada umumnya berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Peningkatan pendidikan harus menjadi perhatian semua pihak dan terutama ditujukan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, anak jalanan, dan juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan sekolahnya.

Selanjutnya, mengenai penyebarluasan informasi pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun yang peduli dengan masalah perdagangan orang dan ditujukan kepada khalayak luas baik dalam rangka memberikan informasi agar mereka mengetahui masalah perdagangan orang, maupun dalam rangka mengajak

mereka berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya dalam upaya-upaya penghapusannya. Kampanye tentang kasus-kasus perdagangan orang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik) dalam rangka pengembangan opini, keberpihakan, dan dukungan massa.

Sementara peningkatan pengawasan, terutama ditujukan terhadap para pekerja migrant. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia dalam merekrut, menampung, melatih, menyiapkan dokumen dan memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Upaya ini didukung oleh masyarakat melalui DPR RI sehingga beberapa undang-undang telah ditetapkan: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang adalah unsur tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan tindak perdagangan orang. Untuk lebih jelasnya perhatikan pada tabel 1 yang dikutip dalam buku Farhana.

Tabel 1
Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal	Tindak Pidana	Pidana	Pidana	Denda/Tamba-	Pidana
-------	---------------	--------	--------	--------------	--------

		Minimal	Maksimal	han/atau	Tambahan
2	Perdagangan	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
3 dan 4	Perdagangan orang ke dalam atau ke luar Indonesia	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
5	Perdagangan anak melalui adopsi	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
6	Perdagangan anak ke dalam atau ke luar negeri	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
7 (1)	Perdagangan orang mengakibatkan luka fisik dan psikia	4 tahun	20 tahun	+120-800 jt Rp	-
7 (2)	Perdagangan orang mengakibatkan kematian	5 tahun	Seumur hidup	+200 jt-5 miliar Rp	-
8	Perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt Rp	Pemberhentian tidak hormat
9	Mengerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tetap tidak terjadi	1 tahun	6 tahun	+40-240 jt Rp	-
10	Membantu/melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
11	Merencanakan/melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
12	Menggunakan/memanfaatkan korban tindak pidana	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
15	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi: untuk pengurusan dan korporasi	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp 360 jt- 1 miliar 800 jt Rp	a. Pencabutan izin b. Perampasan kekayaan c. Pencabutan status badan hukum d. Pemecatan pengurus e. Pelanggaran kepada pengurus mendirikan

					korporasi bidan usaha yang sama
16	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir	4 tahun	20 tahun	+120-800 jt Rp	-
17	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir terhadap anak	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt Rp	-

Setelah melihat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku pada saat ini, ternyata masih dirasakan belum terasa komprehensif dan memadai untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penghukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang utamanya perlindungan terhadap korban. Di sisi lain, harus dihadapkan dengan praktik-praktik perdagangan orang yang sudah melewati batas wilayah Negara, keterbatasan jangkauan hukum yang ada telah menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Terutama dalam menentukan unsur-unsur perbuatan atau jenis tindakan kejahatan perdagangan orang dan ketentuan-ketentuan terhadap kerjasama internasional dalam proses pidananya.

Dalam Undang-Undang perdagangan orang terdapat kemajuan karena ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang menganut minimal pidana hingga maksimal, serta korban yang berhak mendapat kompensasi (dari Negara) dan resitusi serta ganti rugi dari pelaku. Undang-Undang ini juga memberikan peluang adanya usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi maupun pelapor. Disamping itu, dikenal juga pemberatan hukuman pada kasus perdagangan orang sebagaimana dikenal dengan hukum pidana Indonesia. hal lain adalah peran

masyarakat untuk membantu mencegah terjadinya korban tindak pidana perdagangan orang dan diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang.

Dalam persoalan perdagangan bayi dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak, jika melihat proses mulai dari mencuri secara diam-diam di Puskesmas maupun Rumah Sakit kemudian menjual kepada makelar perdagangan bayi. Perbuatan ini dapat merugikan bukan bagi si bayi sendiri, namun yang mendapat kerugian baik beban psikologi dan materiil adalah orang tua si bayi.

B. Upaya Penindakan (*Represif*) Perdagangan Anak

Penindakan hukum kepada *trafficker*, sesuai dengan kewenangannya diselenggarakan oleh yang berwajib (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), akan tetapi mengingat perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang beroperasi diam-diam, kepada masyarakat umum, lembaga kemasyarakatan dan LSM, disosialisasikan agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap kejahatan ini dengan cara memberikan informasi kepada yang berwenang jika melihat, menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan itu.

Pihak Kepolisian di seluruh wilayah telah membuka *hot-line* yang dapat diakses oleh masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindak kejahatan, dan pihak Kepolisian akan segera menanggapi dan menindaklanjuti informasi yang diberikan

Perdagangan orang menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri karena telah menjadi sumber penghasilan yang sangat besar bagi sindikat kejahatan internasional. Kejahatan lintas batas ini juga menjadi ancaman bagi kesehatan manusia karena korbannya: pria, wanita dan anak-anak diperjual-belikan dengan tidak ada rasa kemanusiaan dan tidak mempedulikan akibat kejiwaan dan penyakit yang dapat menimpa korbannya.

Sebagai bagian dari *transnational organized crime*, perdagangan orang tidak dapat diperangi secara partial atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Negara-negara yang anti perbudakan dan berniat melindungi kehidupan warganegaranya harus bersatu padu bekerjasama memerangi perdagangan orang. Kerjasama antar Pemerintah (G-to-G) antar LSM, organisasi masyarakat dan perseorangan dalam dan luar negeri harus dibina dan dikembangkan sehingga terbentuk kekuatan yang mampu memberantas kejahatan terorganisir tersebut.

Kerjasama penindakan hukum antara Pemerintah Indonesia dengan negara tetangga dan negara tujuan lainnya sudah lama dibina seperti misalnya dengan Pemerintah Australia dan Hong Kong yaitu melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between RI and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*), dan Undang-undang No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri

(Agreement between the Government of Indonesia and the Government of Hong Kong for the Surrender of Fugitive Offenders).

Kerjasama dengan negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura sangat penting dilakukan. Komitmen bersama antara aparat penegak hukum Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk mengatasi perdagangan orang sebagaimana telah menjadi tujuan dari Konferensi Penegakan Hukum Internasional tentang Perdagangan Orang, di Batam bulan Februari 2004, yang dihadiri 50 orang aparat penyidik dari Malaysia, Singapura dan Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh Duta Besar AS untuk Indonesia yang mengajak penyidik Kepolisian negara peserta untuk menghukum pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dengan hukuman seberat-beratnya.

Amerika Serikat yang ditengarai sebagai negara tujuan perdagangan orang, memberikan dukungan kuat kepada negara-negara lain sebagai daerah sumber atau sebagai daerah transit, termasuk kepada Indonesia. Sejak awal tahun 2005, Amerika Serikat menyatakan penguatan komitmen dukungannya melalui keterikatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat senilai US\$ 9 juta dalam periode waktu empat tahun, dalam rangka memerangi perdagangan orang lintas batas dari dan ke Indonesia, dan juga yang terjadi di dalam negeri Indonesia. Kerjasama tersebut ditujukan untuk: pencegahan perdagangan orang melalui pendidikan dan cara lainnya; memberikan bantuan, perlindungan dan reintegrasi korban perdagangan orang; serta memperkuat upaya-upaya penegakan hukum untuk menghentikan pelaku perdagangan orang (*trafficker*). Sebagai *executing agencies* adalah LSM internasional dan badan-badan

seperti *Save the Children-AS*, *American Center for International Labor Solidarity* (ACILS), *International Catholic Migration Commission* (ICMC), dan *International Organization for Migration* (IOM) bekerja sama Instansi Pemerintah Indonesia, kelompok masyarakat madani Indonesia, dan komunitas lokal.

Patut diakui bahwa walaupun sudah ada peningkatan upaya penindakan dan pencegahan perdagangan orang termasuk pemberian informasi kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap perdagangan orang mengenai hak-hak mereka (seandainya menjadi korban) seperti misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah negara setempat dan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, namun masih banyak korban yang belum memahami layanan yang seharusnya dan sewajarnya mereka dapatkan, ketimbang perlakuan Pemerintah setempat yang lebih cenderung menganggapnya sebagai kriminal, migran ilegal atau *undocumented migrant*. Pada perkembangannya, perdagangan perempuan dan anak atau *Trafficking* di Indonesia hingga tahun 2016 ini bisa dikatakan masih belum ada titik terang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan bayi yaitu sebagai berikut :
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Pendidikan
 - c. Faktor Penegakan Hukum

Adapun akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan bayi yaitu sebagai berikut :

Kasus perdagangan anak terutama bayi termasuk tindak pidana yang tergolong kejam. Sebab, bukan saja telah merampas hak anak untuk hidup merdeka, tetapi juga menyebabkan anak untuk terpaksa harus berpisah dan kehilangan kasih sayang orang tua kandungnya serta tercabut dari akar budaya komunitas aslinya.

2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam, ketentuan sanksi hukum menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat dikatakan sesuai dan selaras dengan *maqasid al-tasyri'*, yaitu mencegah bahaya dan dampak kerugian yang lebih besar bagi kehidupan anak. Kemudian yang berwenang untuk memformulasikan ketentuan hukum tersebut adalah *Ulil al-*

Amri. Adapun ketentuan pidana *ta'zir* semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan kewajiban yang tidak dinashkan oleh syara', diserahkan kepada penguasa atau *Ulil al-Amri* yang masing-masing merupakan ahli ijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya.

B. Implikasi Penelitian

Jenis jual beli manusia yang sulit diberantas di muka bumi ini adalah jual beli anak terutama anak perempuan untuk keperluan seksual. Bagi para sindikat penjualan bayi, bisnis ini merupakan bisnis besar yang dapat menghasilkan keuntungan milyaran rupiah dalam waktu singkat. Bisnis ini pun dibungkus dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern dan terkesan sulit untuk dikenali.

Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan merdeka, sehingga segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap kebebasan dan kemerdekaan setiap individu sangat ditentang oleh Islam. Islam telah menghapus segala jenis praktek perbudakan dan mengakui serta melindungi adanya kemerdekaan dan kebebasan setiap individu yang merupakan hak asasi manusia yang sudah dibawa sejak manusia itu dilahirkan. Dengan demikian perdagangan anak merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Kesadaran bahwa anak pada hakikatnya merupakan titipan dan amanat Allah swt maka sepantasnya harus ditanggapi dan diterima dengan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnkan*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2010.
- ELSAM. *Position Paper Advokasi RUU KUHAP Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Ed. 1; Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Falah, Fajhrul. “Skripsi Suryadinim Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perdagangan Anak”. Lihat pada situs [www. uinjkt.ac.id](http://www.uinjkt.ac.id). (Di akses pada tanggal 10 Desember 2015).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akedemi Presindo, 1989.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam 1*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Harkrisnowo, Harkristuti. “Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia”.Sentra HAM UI draf tanggal 28. Februari 2003. Lihat pada situs www.lfip.org. (Di akses pada tanggal 11 Desember 2015).
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, “Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Person*) di Indonesia Tahun 2004-2005”. Lebih lanjutnya dalam situs <http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/11/upaya-upaya-pencegahan-dan-penindakan.html>. (Di akses pada tanggal 11 Desember 2015).

- Lestari, Septiani. *Maraknya Perdagangan Bayi di Indonesia*. Lihat pada situs <https://septianilestari.wordpress.com/2013/05/05/maraknya-perdagangan-bayi-di-indonesia/>. (Diakses pada tanggal 13 Januari 2016).
- L.M. Ghandi Lopian dan Hetty A. Geru. *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Murniyati, Ni Nyoman “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia”. Jurnal penelitian hukum (September 2015). <http://download.portalgaruda.or/article.php?article>. (Di akses pada Tanggal 19 september 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Najahan, Muh. Rois. “Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Priyanto, Anang. *Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- R. Sugandhi. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cet. 2; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Setyowati Soemitro, Irma. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sulistiyowatirianto, dkk. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Sofian, Ahmad. *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, (Jakarta: PT.Sofmedia, 2012).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3; Jakarta: Universitas Indonesia (UII) Press, 1986.
- Sopo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa, 2001.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, 1976.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Suryadinim. “*Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perdagangan Anak*”.Lihat pada situs <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=8336>. (Di akses pada tanggal 10 Desember 2015).

R. Sugandhi. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 2014. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, t.th.

Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,” dalam Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wardi Musclish, Ahmad . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Lelly Herlianti, lahir di Desa Bontominasa, Kab. Bulukumba pada tanggal 17 Juni 1994 merupakan anak bungsu dari lima bersaudara pasangan Alm. Abd. Azis, dengan Ibu Ramlah. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari SDN 69 Anisia Kec. Bulukumpa pada Tahun 2001 hingga 2006 Kemudian melanjutkan sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Bulukumpa di Kec. Bulukumpa pada Tahun 2006, lalu kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Sinjai Selatan pada tahun 2010 di Kab. Sinjai kemudian pada tahun 2011 pindah ke SMAN 1 Bulukumpa atau sekarang bernama SMAN 2 Bulukumba di Kab. Bulukumba. Alhamdulillah, pada jenjang inilah penulis banyak aktif di organisasi kesiswaan yakni sebagai Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Periode 2008-2009 kemudian kembali menjadi sekertaris umum OSIS pada periode 2009-2010,

Penulis juga aktif di organisasi Palang Merah Remaja (PMR) Unit 206 SMA Neg. 1 Sinjai Selatan kemudian juga aktif di PMR SMAN 1 Bulukumpa, penulis juga aktif di Laskar Pencinta Alam Selatan (LASPALAS) hingga saat ini dan bertindak sebagai dewan penasehat organisasi dan mengikuti berbagai kegiatan seperti lomba baca puisi sekabupaten Bulukumba yang dimana meraih juara 3, lomba cerdas cermat antar wilayah, lomba Debat cepat dan meraih juara 1 umum dalam kegiatan PORSENI tingkat sekolah pada tahun 2012, dan Trening Of Trainer (TOT) dalam kegiatan TOT se Sulawesi-Selatan oleh PKC KOPRI SULSEL di Wajo. Pada tahun 2012 ia melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK). Pada jenjang tersebut disamping aktifitas kuliah, penulis juga aktif organisasi sebagai Anggota bidang keperempuanan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana dan Ketatanegaraan periode 2012-2013, Anggota di Srikandi Pemuda Pancasila Makassar, Sekretaris Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum, Kom. UIN Alauddin Makassar, Cab. Gowa periode 2014-2015, Ketua Umum Korp PMII Putri (KOPRI) cab. Gowa periode 2015-2016.